

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Demokrasi merupakan suatu sistem yang ideal bagi setiap negara, Karena demokrasi menjanjikan kebebasan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Demokrasi menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government by the people*, dalam bahasa Yunani *Demos* berarti rakyat, *Kratos* berarti kekuasaan.¹ Berdasarkan pandangan Abraham Lincoln bahwa, “*Democracy Means the Rule of People*”, atau demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, artinya rakyat memiliki peranan penting dalam suatu pemerintahan karena sebagai *Agend of Control*, baik dalam pembuatan kebijakan ataupun dalam pemilihan pemimpin.

Dalam sistem negara demokrasi, banyak cara yang dilakukan oleh para pemangku kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan, salah satunya melalui politik dinasti. Politik dinasti sendiri dapat diartikan sebagai regenerasi kekuasaan mengandalkan darah dan kekerabatan untuk mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan.² Praktik politik dinasti di Indonesia ini disebabkan oleh *Historical Government* sebab sejak dahulu Indonesia merupakan negara yang memiliki kerajaan-kerajaan dengan sistem pemerintahannya berdasarkan *feodalisme* menyebabkan budaya politik di

¹ Miriam Budiardjo, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 105.

² Martin Herna Susanti, (2017), Politik Dinasti Dalam Pilkada Indonesia, *Journal Of Government And Civil Socirty*, Vol. 1, No. 2, h. 114.

Indonesia sangat unik yang terbawa hingga saat ini. Salah satu budaya politik yang unik ialah *kawulo*. Budaya politik *kawulo* menempatkan perilaku politik dengan berdinasti politik sebagai pengkekalan kekuasaan.³ Para pelaku politik dinasti akan mendorong keluarga secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi untuk ikut serta masuk ke dalam pemerintahan.

Benih-benih politik dinasti di Indonesia di mulai sejak berakhirnya Orde Lama digantikan dengan Orde Baru, yang mengklaim akan mengembalikan demokrasi kejalur yang benar karena mengingat penyelewengan yang terjadi pada Orde Lama.⁴ Tetapi nyatanya timbul babak baru pada era Orde Baru yang cita-cita awalnya ingin mengembalikan demokrasi kepada nilai-nilai demokrasi akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, nilai-nilai dari demokrasi jauh dari harapan. Masa era Orde Baru ditandai dengan kebebasan masyarakat sangat sulit didapatkan sehingga ke otoriterianisme terjadi, suara rakyat terbungkam, hal ini membuka saluran timbulnya praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam pemerintahan terjadi.⁵

Politik dinasti Indonesia terus berkembang setelah adanya ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, kemudian

³ Nurul Qolbi Izazy, (2011), *Sisi Lain Politik Dinasti*, Jakarta: Majalah Sosial Universitas Indonesia, h. 1-2.

⁴ Bambang Cipto, (1999), *Indonesia Memasuki Era Politik Dinasti : Dari Bilik Suara Kemasa Depan Indonesia Potret Konflik Pasca Pemilu dan Nasib Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h 90.

⁵ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, h.133.

berubah menjadi Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 dan politik dinasti di Indonesia mengalami puncaknya setelah ketetapan MPR tersebut berubah menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dimana daerah Otonom akan mengatur mengurus daerahnya sendiri demi kemakmuran masyarakat, sentralisasi dan desentralisasi.

Perwujudan dari desentralisasi berdampak pada bagaimana masyarakat daerah memilih pemimpin mereka yaitu dengan melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh masyarakat. Pilkada di harapkan dapat menghasilkan pemimpin yang bersal dari rakyat, dengan demikian setiap orang memiliki hak memilih dan dipilih untuk menjadi kepala daerah. Akan tetapi di sisi lain fenomena baru perpolitikan di tingkat lokal adalah politik dinasti di beberapa daerah di Indonesia. Hal tersebut tergambar dari sejak diselenggarakannya Pilkada secara langsung.

Menariknya politik dinasti berkembang pesat di Indonesia bagaikan jamur yang terus tumbuh subur dan mengakar hingga sangat sulit dimusnahkan. Fenomena tersebut merekonstruksikan sebuah kekuatan dominan pada dinasti politik di tengah sistem republik demokratis. Hal tersebut seolah menafsirkan demokrasi di Indonesia memberikan ruang yang bebas dalam melakukan politik dinasti, berikut peta politik dinasti di Indonesia tergambar seperti tabel di bawah ini.⁶

⁶ Junaidi, Veri. (2018). *Pilkada Serentak: Bagaimana Dampak Politik Dinasti dan Apa Perlu Dihambat?*, diakses dari <http://ww.bbc.com/Indonesia /amp/Indonesia-44597871> tanggal 29 November 2018.

Table I.1
Peta Politik Dinasti di Indonesia

No.	Prov/Kota/Kab	Dinasti	Anggota Dinasti
1	Dinasti Politik di Sumatera Utara	H.Ashari Tambunan (Bupati Deli Serdang)	Kakak/Amri Tambunan (alm) Bupati Deli Serdang 2004-2014
2	Dinasti Politik di Sumatera Selatan	Alex Noerdin (Gubernur 2008-2018)	Anak/H.Dodi Reza Alex Noerdin Bupati Musi Banyuasin 2017-2022
3		Herman Deru (Gubernur 2018-2023)	Anak/Percha Leanpuri Anggota DPD 2004-2019 Adik Laki - laki /Bertu Merlas Anggota DPR RI Adik Perempuan /Melinda Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan
4	Ogan Ilir	Ir. H. Mawardi Yahya Bupati Ogan Ilir Sumsel (2005-2015) Walil Gubernur Sumsel (2018-2023)	Anak /Wazir Nofiadi Bupati Ogan Ilir 2016-2017 Adik Kandung /Ridho Yahya Walikota Prabumulih 2018-2023
5	Palembang	Romi Hertton (alm) Walikota Palembang 2013-2014	Adik Perempuan/Firianti Agustinda 2016-2018 2018-2023
6	Politik Dinasti di Banten	Ratu Chosiyah Gubernur Banten (2007-2017)	Suami /Hikmat Tomet (alm) anggota DPR 2009-2014 Ibu Tiri/Heryani (Wakil Bupati Pandenglang) Adik Kandung /Ratu

			<p>Atut Chasanah (Wakil Bupati Serang) Adik Kandung /Haerul Zaman Walikota Serang) Adik Ipar/Airin Racmi Diany (Walikota Tangerang Selatan) Saudara Tiri/Ratu Lilis Karya Wati (Ketua DPD Golkar Serang 2009-2014 Anak Kandung/Andika Hazrumy DPD Banten 2009-2014 Caleg DPR Partai Golkar pada Pemilu Dapil Banten 2014-2018 Menantu(Istri Andika)/Adde Rosi Khoirunisa (Wakil Ketua DPRD Kota Serang) Adik Ipar Ratu Atut /Aden Abdul Khalid (Caleg DPRD Banten)</p>
7	Politik Dinasti Di Jawa Barat	Amin Santoso Anggota DPRD Partai Demokrat	<p>Istri /Yoyoh Rukiyah Amin Anggota DPRD Jawa Barat Partai Demokrat Anak/Yosa Octora Santono Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuningan</p>
8	Purwakarta	Dedy Mulyadi (Bupati Purwakarta 2008-2018)	<p>Paman/Bunyamin Dudih (Bupati Purwakarta 1993-2003 Istri /Anne Ratna Mustika</p>

			(Bupati Purwakarta)
9	Dinasti Politik di Jawa Tengah	Sri Hartini Bupati Klaten (2016-2021)	Ayah Haryanto Wibowo Bupati Klaten 2000-2005
10	Dinasti Politik di Jawa Timur	Fuad Amin Imron (Bupati Bangkalan 2003-2012)	Keponakan/Makmun ibnu Fuad (Bupati Bangkalan Petahana Adik /Abdul latif Amin Imron Calon Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan
11	Probolinggo	Nyono Suharli Wihandoko (Bupati Jombang 2003-2013)	Istri Tjaturina Yuliasuti Ketua DPD Partai Golkar Kab. Jombang Istri /Hj.Puput Tantriana Sari Calon Bupati Probolinggo 2013- 2018
12	Dinasti Politik di Kalimantan Barat	Cornelis M.H Gubernur Kalimantan Barat 2008-2018	Anak Karoline Margareta Natasa Bupati Landak 2017- 2022
13	Dinasti Politik di Kalimantan Timur	Syaukani Hassan Rais (Bupati Kutai 2005- 2010)	Anak /Rita Widyasari Bupati Kutai (2010-2017)
14	Dinasti Politik di Sulawesi Selatan	Dr.Ir.H.Asrun Walikota Kendari Periode 2007-2017	Anak/Adwiya Tama Dwi Putra Walikota Kendari (2017-2022) Paman/Imran Bupati Konawe Selatan (2005-2015) Menantu/Ahmad Safei Bupati Kolaka 2014-2018

Sumber: BBC Indonesia

Dari tabel di atas ringkasnya menggambarkan praktik politik dinasti di Indonesia merebak seperti budaya yang terus tumbuh. Berdasarkan pengetahuan penulis setidaknya ada 57 daerah dari 15 Provinsi, Kabupaten, Kota yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari provinsi Sumatra Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku.⁷ Dari fenomena politik dinasti memperlihatkan hanya satu keluarga dominan dalam suatu pemerintahan sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan berlandaskan kepentingan keluarga atau individual tanpa mementingkan kepentingan masyarakat secara umum. Oleh sebab itu peneliti ingin melihat politik dinasti yang terjadi di Indonesia melalui perspektif model-model demokrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut David Held mengemukakan model-model demokrasi dalam bukunya yang berjudul "*Models of Democracy*" menerangkan secara jelas model-model demokrasi dari awal hingga tahun 2006. Menurut David Held demokrasi terbagi menjadi 13 model yaitu: Demokrasi Klasik: Athena; Republikanisme Protektif; Republikanisme dan Perkembangan; Demokrasi Protektif; Demokrasi Developmental; Demokrasi Sosialis; Demokrasi Kompetisi Elite; Pluralisme; Demokrasi Legal; Demokrasi Partisipatif; Demokrasi Deliberatif; Otonomi Demokrasi; Demokrasi Kosmopolitan.

⁷ Harits, Muhamad. (2013). *Mendagri : 57 Kepala Daerah Melakukan Politik Dinasti*, diakses dari <https://www.merdeka.com/politik/mendagri-57-kepala-daerah-melakukan-politik-dinasti.html> tanggal 29 November 2018.

Setiap model demokrasi memiliki karakteristik dan sistem tersendiri dalam menjalankan model-model demokrasinya. Oleh karena itu penulis ingin mengupas tentang demokrasi di Indonesia terkait berkembangnya budaya politik dinasti yang akan ditarik benang merahnya dengan menggunakan perspektif model-model demokrasi yang dikemukakan oleh David Held. Dari latar belakang tersebut menyebabkan penelitel tertarik untuk menelitel masalah “*Politik Dinasti di Indonesia Dalam Perspektif Model-Model Demokrasi* “ Sehingga dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktik politik dinasti di Indonesia ?
2. Bagaimana praktik politik dinasti yang terjadi di Indonesia dalam perspektif model-model demokrasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik politik dinasti di Indonesia
2. Untuk mengetahui praktik politik dinasti yang terjadi di Indonesia dalam perspektif model-model demokrasi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memperluas ilmu mengenai demokrasi serta diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian

dimasa yang akan datang terkait masalah politik dinasti dalam perspektif model-model demokrasi.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ilmu politik khususnya terkait tentang politik dinasti di Indonesia dalam perspektif model-model demokrasi. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan kepada *stake holder* terkait pembuatan Undang-Undang Pemilu untuk mengantisipasi politik dinasti dan kekuasaan dominan dalam suatu pemerintahan.

E. Tinjauan Pustaka

Fenomena politik dinasti merupakan suatu pembahasan yang menarik untuk diteliti ketika dipandang dari demokrasi secara filosofis, bukan hanya melihat demokrasi secara nilai tetapi yang lebih penting lagi adalah politik dinasti yang di jalankan di Indonesia sekarang sudah menjadi budaya yang mengakar sehingga memiliki dampak dan pengaruh yang besar pada nilai-nilai Pancasila serta persepsi masyarakat akan demokrasi dan pemilihan pemimpin. Sejauh ini belum ada penelitian yang memiliki judul yang sama. Penelitian tentang politik dinasti dalam perspektif model-model demokrasi.

Teguh Badru Salam dalam "*Sustainibilitas Pembangunan Politik Dinasti Ratu Atut Choisiah di Banten*". Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana pembangunan politik dinasti Ratu Atut di Banten dan dipandang dari Etika Islam. Keberlanjutan yang di lakukan oleh dinasti Ratu Atut membangun jaringan menempatkan keluarganya di setiap sektor

pemerintahan. Penelitian tersebut sudah membahas bagaimana pembangunan politik dinasti di Banten di pandang dari Etika Islam, tetapi belum membahas masalah yang penulis angkat yaitu “*Politik Dinasti Dalam Perspektif Model–Model Demokrasi* yaitu politik dinasti yang dilakukan dipandang dari model–model demokrasi.”⁸

Maryon dalam “*Politik Kekerabatan Dalam Negara Demokrasi*“. penelitian tersebut menggunakan teori demokrasi dan liberalisasi, selanjutnya penelitian ini menjelaskan bagaimana politik kekerabatan Ratu Atut Choisiah di negara demokrasi. Penelitian ini sudah membahas bagaimana politik kekerabatan di Banten di pandang dari etika demokrasi, tetapi belum membahas masalah yang penulis angkat yaitu *Politik Dinasti Dalam Perspektif Model–Model Demokrasi* yaitu politik kekerabatan yang di lakukan di pandang dari model–model demokrasi.”⁹

Martien Herna dalam “*Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia* “. penelitian tersebut menjelaskan bagaimana dinasti politik dalam Pilkada di Indonesia pada pasca Orde Baru dan setelah adanya Otonomi daerah, daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri untuk terciptanya kemakmuran bersama termasuk pada cara pemilihan bagi masyarakat daerah. Hal inilah yang kemudian menyebabkan fenomena dinasti lahir dan sampai seseorang yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya dengan meletakkan keluarga di sektor pemerintahan. Penelitian

⁸Teguh Badru Salam, (2016), *Sustainibilitas Pembangunan Politik Dinasti Ratu Atut Choisiah Di Banten* , Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

⁹ Maryon, (2013), *Politik Kekerabatan Dalam Negara Demokrasi* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

ini sudah membahas *Dinasti politik dalam Pilkada di Indonesia* tetapi penelitian tersebut belum membahas masalah yang penulis angkat yaitu *Politik Dinasti Dalam Perspektif Model–Model Demokrasi* yaitu politik kekerabatan yang dilakukan dipandang dari model–model demokrasi.¹⁰

Sri Purwanti dalam “*Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa Studi di Desa Wawasan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan*“. Pada penelitian Sri Purwanti menjelaskan bagaimana *Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa Yang Terjadi di Desa Wawasan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan*. Penelitian tersebut sudah membahas faktor penyebab bergulirnya dinasti politik dalam kepemimpinan kepala desa tetapi penelitian tersebut belum membahas masalah yang penulis angkat yaitu *Politik Dinasti Dalam Perspektif Model–Model Demokrasi* yaitu politik kekerabatan yang di lakukan di pandang dari model–model demokrasi.¹¹

Suyadi dalam “*Bentuk dan karakter Politik Dinasti di Indonesia*“ penelitian tersebut menjelaskan dan menggambarkan bagaimana bentuk dan karakter politik dinasti di Indonesia tetapi penelitian tersebut belum membahas masalah yang penulis angkat yaitu *Politik Dinasti Dalam Perspektif Model–Model Demokrasi* yaitu politik kekerabatan yang dilakukan dipandang dari model–model demokrasi.

¹⁰ Martien Herna, (2017), *Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia*, *Journal of Government and Civil Society*, Volume 01, No. 2.

¹¹.Sri Purwanti, (2016), *Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa Studi di Desa Wawasan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan*, Lampung: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dari berbagai penelitian yang tercantum di atas sudah membahas tentang politik dinasti dipandang dari Etika Islam, Etika demokrasi, bentuk-bentuk politik dinasti dan faktor penyebab politik dinasti, tetapi belum sampai membahas masalah yang penulis angkat yaitu dari sebuah fenomena politik dinasti yang terjadi di berbagai Provinsi, Kabupaten, Kota di Indonesia masuk ke dalam model Demokrasi jenis apa ditinjau dari model-model demokrasi yang dikemukakan oleh David Held dalam bukunya yang berjudul “*Models of Democracy*”.¹²

F. Kerangka Teori

Pandangan model-model demokrasi yang cocok terus berkembang dari zaman Yunani Kuno hingga sekarang. Setiap model demokrasi memiliki sistemnya dan esensi tersendiri dalam menjalankannya melihat hal tersebut demokrasi yang terjadi di Indonesia masuk ke dalam model demokrasi apa yang di dalamnya terdapat dinasti politik. Menurut KBBI model dapat diartikan sebagai pola, contoh, acuan dan ragam.¹³ Menurut Arent Lijphart menyebutkan model demokrasi terbagi menjadi dua yaitu model demokrasi *westminster* dan model demokrasi konsensus. Model demokrasi *westminster* adalah *majority of rule* model demokrasi ini menekankan pada mayoritas sebagai pemerintah dan minoritas sebagai oposisi. Model demokrasi konsensus menekankan pada (kesetaraan) pembatasan dan pembedaan kekuasaan dapat juga di katakan demokrasi langsung karena pengambilan

¹².Suyadi, (2014), *Bentuk dan Karakter Politik Dinasti di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹³ Moeljadi, David, Randy Sugianto, Jaya Satrio, & Kenny Hartono. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI.

keputusan berdasarkan pada ilmu pengetahuan, sehingga pengambilan kontrol atas kehidupan sehari-hari menjadi sangat mungkin.¹⁴

Sedangkan David Held mendeskripsikan model-model demokrasi dalam bukunya yang berjudul “*Models of Democracy*”. Dalam buku tersebut David Held menjelaskan secara luas mengenai pengertian, sejarah dan perkembangan demokrasi sejak pertama kali ide itu lahir dari Yunani kuno, hingga kini. Kemudian model tersebut baginya menjadi tiga belas, lalu disederhanakan menjadi tiga bagian berdasarkan sejarah atau perkembangan ide model tersebut lahir.¹⁵

1. Bagian Pertama Model-Model Demokrasi Klasik

a. Model pertama; Demokrasi Klasik: Athena

Prinsip penilaian dari demokrasi Athena ini adalah warga negara harus menikmati kesetaraan politik sehingga bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran.

b. Model kedua; Republikanisme Protektif

Prinsip penilaian partisipasi politik merupakan suatu kondisi yang penting bagi kebebasan pribadi jika warga negara tidak menguasai diri mereka, maka mereka akan didominasi oleh orang lain

c. Model Ketiga; Republikanisme Perkembangan

Prinsip penilaian para warga harus menikmati persamaan politik dan ekonomi agar tidak seorangpun dapat menjadi penguasa bagi yang lain dan semua dapat menikmati kebebasan yang sama.

¹⁴ Lijphart Arendt, (1924), *Democracies Patterns Of Majoritarian And Consensus Government In Twenty-One Century*. New Haven And London: Yale University Press.

¹⁵ David held, (2007), *Models Of Democracy*, Jakarta: The Akbar Tanjung Institute 2, h. .

d. Model Keempat; Demokrasi Protektif

Prinsip penilaiannya adalah para penduduk membutuhkan perlindungan dari para pemimpin, begitu pula sesamanya, untuk memastikan mereka yang memimpin menjalankan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat.

e. Model Kelima; Demokrasi Developmental

Partisipasi dalam kehidupan politik yang penting tidak hanya perlindungan kepentingan individu namun juga bagi pembentukan rakyat yang tahu mengabdikan dan berkembang, keterlibatan individu terpenting bagi peningkatan kapasitas individu.

f. Model Keenam; Demokrasi Sosialis

Pembangunan yang bebas dari semuanya hanya dapat diraih dengan pembangunan yang bebas dari setiap orang. Kebebasan harus mengedepankan kesetaraan politik dan ekonomi yang benar-benar lengkap, karena hanya dengan kesetaraan dapat menjamin keadaan yang diperlukan untuk merealisasikan kemampuan manusia sehingga seseorang dapat memberi sesuai dengan kemampuannya dan menerima apa yang mereka butuhkan.

2. Bagian Kedua Model-Model Demokrasi Kontemporer

g. Model Ketujuh; Demokrasi Kompetisi Elite

Prinsip penilaiannya adalah metode pemilihan elite yang terampil dan imajinatif yang mampu mengambil keputusan yang diperlukan dalam legislatif dan administratif.

h. Model Kedelapan; Pluralisme

Prinsip penilaian menjamin pemerintahan oleh minoritas dan dengan demikian kebebasan politik penghambat tumbuhnya faksi-faksi dengan kekuasaan berlebihan dan negara tidak responsif.

i. Model Kesembilan; Demokrasi Legal.

Prinsip penilaiannya adalah mayoritas merupakan sebuah cara yang efektif dan selalu diperlukan untuk menjaga individu-individu dari kesewenang-wenangan pemerintah dan mempertahankan kebebasan. Namun bagi kehidupan politik, seperti kehidupan ekonomi, untuk jadi inisiatif dan kebebasan individu, kekuasaan mayoritas harus dibatasi oleh hukum, untuk itu mayoritas harus berfungsi dengan pantas dan bijak.

j. Model Kesepuluh: Demokrasi Partisipatif

Prinsip penilaiannya adalah masyarakat yang membantu perkembangan nilai politik dan warga negara yang memiliki pengetahuan proaktif dalam proses pemerintahan.

k. Model Kesebelas; Demokrasi Deliberatif

Prinsip penilaiannya adalah persyaratan kelompok politik yang dilakukan dengan kesepakatan warga negara yang bebas berdasarkan nalar dan keputusan politik melibatkan warga negara untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada.

3. Bagian Ketiga Model-Model Demokrasi Kosmopolitan

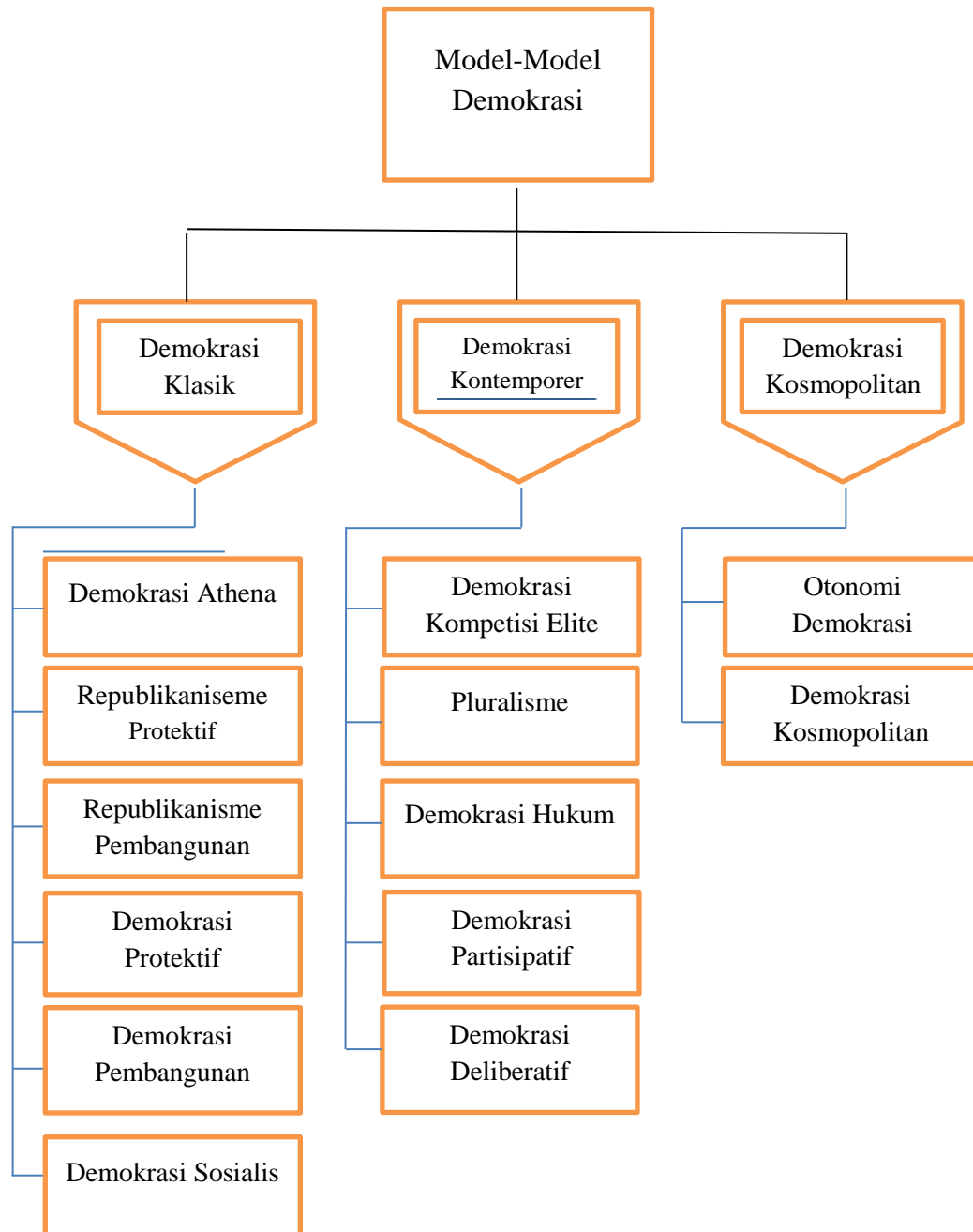
l. Model Keduabelas: Otonomi Demokrasi

Prinsip penilaiannya adalah orang-orang harus menikmati hak yang setara dan kewajiban yang setara dan spesifikasi kerangka kerja politik yang menciptakan dan membatasi kesempatan kesempatan yang disediakan oleh masyarakat, yaitu mereka harus bebas dan setara dalam menentukan kondisi hidup mereka sendiri.

m. Model Ketigabelas: Demokrasi Kosmopolitan

Prinsip penilaiannya adalah dunia harus dalam hubungan global dan regional yang semakin intensif, dengan komunitas nasib yang saling melengkapi, prinsip ekonomi membutuhkan sebuah penegakan dalam jaringan-jaringan regional dan global ataupun pemerintahan lokal dan nasional.

Bagan I.1
Model-Model Demokrasi



Sumber: Diolah Peneliti dari Model-Model Demokrasi David Held

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan/ Metode Penelitian

Tipe Penelitian berjudul politik dinasti di Indonesia merupakan penelitian analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berkaitan dengan fenomena atau melibatkan suatu jenis perilaku manusia. Penelitian pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara analisis (*analyze research*), yang berarti data-data yang mendukung dalam kajian ini berasal dari sumber-sumber dokumen pendukung penelitian baik berupa berita *online*, buku-buku, kamus, jurnal yang mendukung dalam fokus pembahasan penelitian ini.¹⁶

2. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan untuk mendeskripsikan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersifat pokok artinya data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti berupa dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini bersumber dari Berita online mengenai praktik Politik dinasti di Indonesia dan Buku David Held yang berjudul "*Models of Democracy*".

Kemudian data sekunder adalah data yang tersedia, yaitu data yang merujuk pada data yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh orang lain atau data yang memiliki sumber rujukan tertentu.¹⁷ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berita online, laporan-laporan, tulisan, jurnal dan

¹⁶ C.R. Kothari, (1990), *Research Methodology, Methods and Techniques*, India: New Age International. h. 2.

¹⁷ C.R Kothari, *Ibid.*, h. 95.

buku yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti, untuk memperkuat dan menunjang data primer tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi yaitu melihat atau mencatat sebuah laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti arsip-arsip, monografi, serta buku-buku yang ada.¹⁸ Terkait permasalahan fenomena politik dinasti dalam perspektif model-model demokrasi.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hal terpenting adalah menganalisis data yang kita peroleh. Menurut Koentjaraningrat secara umum analisa data adalah tahap pengolahan data dan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.¹⁹

Dalam penelitian ini penelitel menggunakan empat tahapan dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data-data yang mendukung dalam kajian ini berasal dari dokumentasi dan buku David Held yang berjudul “*Models of Democracy*” serta data-data pendukung baik berupa buku-buku, ensiklopedi, kamus berita online, majalah

¹⁸ Ahmad Tanzeh, (2009), *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta:Penerbit Teras, h. 57-66.

¹⁹ Koentjaraningrat, (2008), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, h. 269.

maupun jurnal yang mendukung dalam fokus pembahasan penelitian ini.

b. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan menggolongkan data dengan cara sedemikian rupa agar dapat, memfokuskan pada hal-hal yang penting, reduksi data dilakukan dengan pemilihan, untuk penyederhanaan. Selain itu reduksi data bertujuan untuk memberi gambaran dan pengamatan yang sekaligus untuk mempermudah kembali pencarian data yang diperoleh.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan dalam pembuatan yang telah dilakukan agar dapat di pahami dan di analisis sesuai dengan tujuan. Penyajian data cenderung pada penyederhanaan data agar lebih mudah di baca dan di pahami

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk merangkum data-data yang telah direduksi ataupun telah disajikan. Tahap ini merupakan *interpretasi* penelitel, dimana penelitel menggambarkan makna dari data yang disajikan. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau analisis suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas

sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan menyebabkan tidak terjadi salah pemaknaan dalam penyimpulan tersebut.

Data-data yang sudah dikumpulkan melalui bagian-bagian dari penelitian, akan menjawab dari pokok permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk mengolah hasil dari apa yang di dapatkan selama melakukan penelitian yang kemudian dirumuskan dan diambil kesimpulan dari permasalahan yang akan diteliti

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan suatu bentuk metode yang bertujuan untuk menerangkan hasil penelitian yang berupa memaparkan dengan jelas tentang apa yang diperoleh, dengan cara menggambarkan dan menyusun suatu keadaan menyesuaikan dengan teori yang digunakan dalam permasalahan ini.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusun penelitian ini penelitel menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini pertama akan diuraikannya latar belakang yang mendasari penelitian, kemudian diidentifikasi masalah melalui rumusan masalah. Termasuk pula dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, lalu terdapat tinjauan pustaka dan kerangka teori sebagai acuan penelitian, serta metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, data dan jenis data, teknik pengumpulan data dan lokasi penelitian yang digunakan.

²⁰ Moh Nazir, (1998), *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 23.

BAB II: Gambaran Umum Penelitian, pada bab ini terdapat gambaran umum sejarah demokrasi di Indonesia, politik dinasti dan model model demokrasi.

BAB III: Hasil dan Pembahasan, pada bab ini akan dijelaskan jawaban dari rumusan masalah, analisis politik dinasti dalam perspektif model-model demokrasi.

BAB IV: Penutup, pada bab ini berisi simpulan dan saran atas keseluruhan hasil penelitian.